

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah segala sesuatu pengamalan belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala unsur yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari anak-anak sampai beranjak dewasa dan tua. Manusia mengalami proses pendidikan yang didapatkan dari kedua orang tua, masyarakat, maupun dalam kehidupan lingkungannya. Karena dalam pendidikan suatu kebutuhan bagi manusia yang mempersiapkan sejak hari ini, hari esok untuk membekali diri di hari kemudian, sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan akan terbelakang. Sehingga manusia sangat membutuhkan pendidikan melalui proses penyadaran yang berusaha untuk menyadari, menggali dan mengembangkan potensi dirinya melalui metode pengajaran atau dengan cara lain yang telah diakui oleh masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan tidak mengenal usia, dalam arti bahwa sampai usia tuapun manusia berhak mendapatkan pendidikan. Peranan pendidikan sangat besar dalam mewujudkan manusia yang utuh dan mandiri serta menjadi manusia yang mulia dan bermanfaat bagi lingkungannya, dengan pendidikan manusia akan paham bahwa dirinya itu sebagai makhluk yang dikaruniai kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya.

Bagi Negara pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan konstitusi serta membangun watak bangsa. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi-potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Secara sederhana pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk mempengaruhi peserta didik agar dapat mengembangkan potensi dalam dirinya sehingga menjadi manusia yang seutuhnya yaitu manusia yang bermoral, bertanggung jawab, dan bersosialisasi.

Pendidikan ini dapat dilakukan oleh lembaga sekolah (formal). Setiap kegiatan pendidikan hampir selalu melibatkan unsur-unsur yang terkait didalamnya. Unsur-unsur tersebut yaitu peserta didik, pendidik, tujuan, isi pendidikan, metode, dan lingkungan. Pendidikan sebagai hak asasi setiap individu anak bangsa telah diakui dalam UUD NKRI 1945 pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap Warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, sedangkan ayat 3 menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-undang. Seluruh komponen bangsa baik orang tua, masyarakat, maupun pemerintah bertanggung jawab

mencerdaskan bangsa melalui pendidikan. Hal ini adalah salah satu tujuan bangsa Indonesia yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945 alinea IV (empat).

Masalah yang di hadapi dalam Mengimplementasikan Nilai-nilai Demokrasi dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Man Lengke Rembong Ruteng NTT yakni minimnya Guru Pendidikan Kewarganegaraan di MAN Langke Rembong tersebut, sehingga menghambat proses berjalannya belajar mengajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di dalam kelas, serta kurangnya perhatian atau kurangnya kerja sama dari Dinas Pendidikan dan Lembaga Pendidikan mengenai Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di MAN Langke Rembong tersebut, yang seharusnya jumlah Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini harus proporsional dengan jumlah jam mengajar serta koefisien jumlah siswa, sehingga proses pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) akan berjalan dengan efektif.

Nilai-nilai Demokrasi dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Man Lengke Rembong Ruteng NTT tidak berjalan semestinya, karena kurangnya sumber pengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan minimnya pengetahuan dari Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di MAN Langke Rembong tersebut, dan kurangnya sumber pengetahuan seperti buku PPKn sehingga menghambat proses berjalannya belajar mengajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di dalam kelas, serta kurangnya perhatian atau kurangnya kerja sama dari Dinas Pendidikan dan Lembaga Pendidikan

Bangsa Indonesia ingin mewujudkan nilai-nilai demokrasi yaitu suatu masyarakat yang demokratis. Masyarakat demokratis atau di dalam khasanah Bahasa Indonesia masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang mengakui hak-hak asasi manusia (HAM). Masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang terbuka dimana setiap anggotanya merupakan pribadi yang bebas dan mempunyai tanggung jawab untuk membangun masyarakatnya dengan mengakui perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakatnya. Sikap serta nilai yang telah diuraikan di atas yang merupakan ciri khas masyarakat demokratis tidak datang dengan sendirinya tetapi merupakan suatu proses. Proses tersebut adalah proses pendidikan atau dapat juga disebut sebagai proses kemanusiaan.

Semua tuntutan suara histeris rakyat agar nilai-nilai demokrasi berjalan untuk rakyat, yang terus berkumandang di seluruh pelosok negeri, tidak cukup ruang untuk menyadari kesadaran mendasar demokrasi sebenarnya adalah sebuah proses yang seharusnya berjalan sejak tingkat individual. Sebuah semboyan paten seorang yang demokrat (saya tidak setuju dengan pendapatmu, tapi saya akan mati-matian untuk mendukung berjuang agar kamu bisa menyampaikan pendapat atau menyalurkan pendapat itu) sempitnya pemikiran masyarakat yang menghambat berjalannya demokrasi, di ikuti perilaku politik para tokoh dan elit politik saat ini nampaknya masih jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat. Sulit untuk menemukan elit politik yang mempunyai moralitas dan etika politik yang mencerminkan kesatuan, kejujuran, keadilan, dan toleran dalam kehidupan politik. Akhir-akhir ini terlalu sering melihat para pejabat yang terlibat korupsi, semakin memberikan contoh

yang tidak baik dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi, sehingga masyarakat menilai bahwasan nya nilai demokrasi belum di terapkan dengan baik dalam lembaga-lembaga politik, dan dalam kehidupan sehari-hari,

Demokrasi terdapat nilai-nilai yang merupakan nilai-nilai yang mutlak diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis. Tanpa adanya hal-hal tersebut akan mengakibatkan dampak yang sangat signifikan berupa pemerintahan yang sulit ditegakkan. Nilai-nilai demokrasi tersebut antara lain kebebasan berpendapat, kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, kesetaraan, kedaulatan rakyat, kerjasama dan kepercayaan.

Nilai-nilai demokrasi inilah yang mampu mendorong terwujudnya demokrasi yang terdapat pada suatu Negara. Nilai-nilai Demokrasi merupakan nilai-nilai yang mutlak di perlukan untuk mengembangkan pemerintah yang demokrasi, tanpa adanya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari akan mengakibatkan yang sangat signifikan berupa pemerintah yang sulit di tegakan, dengan adanya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat, lembaga pemerinta, lembaga pendidikan, akan menciptakan masyarakat yang madani. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu negara disebut sebagai negara demokrasi. Kriteria tersebut antara lain adalah : Keikutsertaan dalam pembuatan keputusan, Memiliki kesamaan di hadapan hukum, pendistribusian pendapat yang dilakukan secara adil, memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan, ketersediaan serta keterbukaan informasi, memperhatikan atau mengindahkan fatsoen atau tata krama politik, kebebasan perorangan atau individu, semangat untuk bekerja sama, adanya hak untuk melakukan protes, (Winarno: 2007).

Pendidikan di sekolah, dimana unsur terpenting didalamnya selain guru dan siswa adalah pelajaran yang diajarkan. Pelajaran dapat dimaknai sebagai sesuatu yang diperoleh siswa di sekolah. Pada umumnya proses pembelajaran PPKn yang dilaksanakan yaitu melalui pembelajaran satu arah, yaitu ceramah, dan siswa tidak diajak untuk turut aktif, sehingga proses pembelajaran menjadi kurang menarik, karena siswa tidak memiliki tantangan dan hanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru. Proses pembelajaran seperti ini akan menyebabkan proses pembentukan suasana demokrasi di sekolah dalam pembelajaran PPKn menjadi gagal. Sekolah sebagai lembaga yang melaksanakan transformasi nilai-nilai budaya masyarakat, melalui pendidikan, nilai-nilai dan norma-norma masyarakat dan selanjutnya ditransformasikan dari generasi ke generasi untuk menjamin keberlangsungan hidup dalam sebuah masyarakat.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai mata pelajaran pendidikan moral, pendidikan moral yang merupakan suatu usaha membimbing perkembangan kepribadian peserta didik yang berlandaskan Pancasila. Oleh sebab itu, PPKn di setiap lembaga pendidikan harus tetap dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. PPKn juga sebagai sarana untuk mengembangkan potensi kepribadian peserta didik dengan mengangkat tema perkembangan IPTEK yang terjadi dalam lingkungan Pendidikan,

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai demokrasi dan UUD NRI 1945. Kehidupan dalam

dunia pendidikan sekarang ini yang disertai dengan perkembangan dunia teknologi yang semakin kompleks menuntut guru untuk dapat mengarahkan dan memotivasikan siswa dalam kegiatan yang melibatkan mereka untuk bertindak secara demokratis dengan menciptakan proses belajar mengajar yang menarik, kreatif, dan inovatif. Misalnya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya serta berpendapat secara demokratis, tentu ini sangat membantu memotivasi siswa untuk merealisasikan kehidupan yang demokratis dilingkungan sekolah, dan siswa mampu menerapkannya baik dilingkungan pendidikan, maupun dilingkungan keluarga, dan dalam kehidupan masyarakat.

Seiring dengan semakin canggihnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informatika yang semakin hari semakin canggih, maka pemerataan pelayanan pendidikan perlu diarahkan pada pendidikan yang transparan, berkeadilan, dan demokratis (*democratic education*). Hal tersebut harus dikondisikan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sekolah sebagai sebuah masyarakat kecil (*mini society*) yang merupakan wahana pengembangan peserta didik, dituntut untuk menciptakan iklim pembelajaran yang demokratis, agar terjadi proses belajar yang menyenangkan. Kegiatan proses belajar mengajar siswa dapat aktif, tertarik, dan tertantang untuk membentuk karakter siswa.

Harapan semoga nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan akan dapat diwujudkan, dengan iklim yang demikian, pendidikan mampu melahirkan calon-calon penerus pembangunan masa depan yang sabar, kompeten, mandiri, kritis, rasional,

cerdas, kreatif, dan siap menghadapi berbagai macam tantangan dengan tetap bertawakal terhadap sang penciptanya. Bahwa apa yang dihadapi, apa yang menjadi kehendak Ilahi yang harus dihadapi dan disyukuri.

Maka hubungan antara implementasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang demokratis dengan pembentukan pribadi peserta didik dalam rangka meningkatkan kesadaran pada nilai-nilai pancasila yang didalamnya mencakup nilai-nilai demokrasi pancasila dan UUD 1945. Dalam mewujudkan demokrasi yang terdapat pada suatu Negara di perlukan nilai-nilai demokrasi yang berperan dalam pencapaian tujuan suatu demokrasi yang di jalankan pada Negara tersebut. Demokrasi merupakan salah satu bukti peradaban manusia yang maju.

Pengembangan nilai-nilai demokratis perlu diterapkan untuk menghadapi era globalisasi yang kini diyakini akan menghadirkan banyak perubahan global seiring dengan akselerasi keluar masuknya berbagai kultur dan peradaban baru dari berbagai bangsa di dunia. Itu artinya, perlunya membahas nilai-nilai demokrasi guna mencetak sumberdaya manusia yang bermutu dan profesional harus menyiapkan generasi yang demokratis, sehingga memiliki resistence yang kokoh di tengah-tengah konflik peradaban.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di MAN Langke Rembong Ruteng Nusa Tenggara Timur (NTT)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di MAN Langke Rembong Ruteng NTT?
2. Bagaimana mengimplementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di MAN Langke Rembong Ruteng NTT?
3. Bagaimana guru mengatasi hambatan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tentang materi nilai-nilai demokratis di MAN Langke Rembong Ruteng NTT?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di MAN Langke Rembong Ruteng NTT?
2. Untuk mengetahui bagaimana mengimplementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di MAN Langke Rembong Ruteng NTT?
3. Untuk mengetahui bagaimana guru mengatasi hambatan pembelajaran PKn tentang materi nilai-nilai demokrasi di Man Langke Rembong Ruteng NTT?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain. Demikian pula dengan penelitian tentang Implementasi Nilai-nilai Demokrasi dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di MAN Langke Rembong Ruteng NTT. Dilaksanakannya penelitian ini maka ada dua manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini secara teoritis dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan sejauh mana dalam keberhasilan Implementasi Nilai-nilai Demokrasi dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di MAN Langke Rembong Ruteng NTT. Selain itu juga, dapat diketahui Mengimplementasi Nilai-nilai Demokrasi dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di MAN Langke Rembong Ruteng NTT.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi bagaimana pelaksanaan atau Implementasi dalam penerapan nilai Demokrasi dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di MAN Langke Rembong Ruteng NTT. Dan dapat digunakan sebagai acuan dalam kegiatan penelitian berikutnya bagi masyarakat dan mahasiswa yang akan mengadakan penelitian sejenis.

a. Bagi Peneliti sebagai Calon Pendidik

Sebagai pertimbangan yang akan menambah wawasan dan Mengimplementasi Nilai-nilai Demokrasi dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan khususnya di MAN Langke Rembong Ruteng NTT.

b. Bagi Mahasiswa

Dapat membantu mengembangkan dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sehingga bisa menambah peningkatan kepada materi tentang nilai-nilai demokrasi.

c. Bagi Kampus

Dapat memberi koleksi referensi dalam lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam hasil penelitian ini bisa di jadikan akar dalam pemikiran untuk mengimplementasikan penelitian selanjutnya.

d. Bagi Sekolah MAN Langke Rembong Ruteng NTT

Dapat membantu sekolah MAN Langke Rembong NTT di Kabupaten Manggarai Timur dalam Implementasi Nilai-nilai Demokrasi dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di MAN Langke Rembong Ruteng NTT.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi pembiasan makna dari beberapa istilah dalam penelitian ini maka ada beberapa istilah yang perlu peneliti tegaskan, yakni:

1. Implementasi

Istilah implementasi sering disebut juga dengan pelaksanaan atau tindakan, atau mekanisme dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Sebab dalam implementasi terdapat tindakan atau pelaksanaan mengenai suatu hal atau objek. Implementasi memiliki banyak pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Implementasi adalah suatu proses, atau pelaksanaan yang digunakan dalam kelompok untuk mentransfer ide atau gagasan, program atau harapan.

2. Nilai-nilai Demokrasi

Nilai-nilai demokrasi adalah takaran, harga, sebuah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara (KBBI, 2005: 249), yang dimaksud Warga Negara disini adalah siswa-siswi MAN Langke Rembong Ruteng NTT.

3. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan, agar terjadi hubungan (lingkungan) dengan tingkah laku si belajar (Achmad Sugandi, 2004, 9). Selain itu, Hamalik (2003, 57) berpendapat bahwa pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi yaitu pendidik dan peserta didik, unsur material yaitu materi pelajaran yang diperoleh peserta didik, fasilitas yang terdiri dari sarana dan prasarana yang disediakan seperti ruang kelas, perlengkapan yang terdiri dari buku-

buku dan literatur yang menunjang kegiatan belajar dan prosedur yaitu suatu sistem atau cara yang digunakan pendidik dalam menyampaikan materi pelajaran, unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi dalam pencapaian tujuan pembelajaran.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi Warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945.

4. Sekolah Madrasah Aliyah Negeri

Sekolah Madrasah Aliyah Negeri adalah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan pengajaran tingkat menengah atas dan menjadikan mata pelajaran PPKn sebagai mata pelajaran di sekolah tersebut.